

**Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap
Aggressive Tax Planning pada Perusahaan
yang terdaftar di BEI periode 2013-2015**

Elissa Virginia Gunawan

Dr. Dedhy Sulistiawan, S.E.,M.Sc, Ak.,CA

Jurusan Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika

evir95@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap *aggressive tax planning* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. *Aggressive tax planning* pada penelitian ini diukur dengan effective tax rate sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 sampai dengan 2015. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara karakteristik dewan komisaris yang diukur menggunakan *gender*, komisaris independen, dan ukuran dewan.

Kata Kunci : *Aggressive Tax Planning*, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris.

Abstrak - *The purpose of this study was to examine the effect of effect of Board of Commisioner's Characteristics on the practice of Agressive Tax Planning on companies listed in Indonesia. This research uses profitability (ROA) and firm size as control variable. Aggressive tax planning is measured by the effective tax rate as the dependent variable. The population in this study are companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2013 to 2015. The results show that there is no influence between the characteristics of the board of commissioners as measured using gender, independent commissioners, and board size.*

Keywords : *Aggressive Tax Planning*, , *Independent Commissioners*, *Board Size*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara berkembang yang ada di dunia dengan jumlah penduduk terpadat urutan keempat didunia. Selain memiliki populasi penduduk yang padat, Indonesia terletak pada kondisi geografis

yang strategis dengan sumberdaya alam yang berlimpah di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas sehingga banyak perusahaan asing yang berada di Indonesia. Kondisi inilah yang menguntungkan pemerintahan dalam penerimaan negara yakni dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar untuk menunjang kegiatan perekonomian pemerintah dan sekaligus sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Waluyo *et al.*, 2015). Penerimaan pajak memberi kontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan berbeda dengan perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah “sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pada dasarnya perusahaan memilih membayar pajak lebih rendah atau mendapatkan beberapa penghematan pajak atas pajak yang terutang mengingat bahwa tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan meminimalkan keseluruhan tarif pajak perusahaan secara efektif. Memang, banyak pendekatan perencanaan pajak telah digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan ini (Seyram dan Kwabia 2014). Upaya yang dilakukan untuk menekan beban pajak semaksimal mungkin salah satunya dengan

melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, namun dalam praktiknya *tax planning* dapat mengarah pada suatu titik yang tidak dapat ditoleransi oleh sistem hukum atau tidak sejalan dengan tujuan hukum yang berlaku. Hal itulah yang memunculkan istilah *aggressive tax planning* yang mengarah pada *tax avoidance* atau bahkan *tax evasion*, karena memanfaatkan kelemahan sistem perpajakan dengan tujuan meminimalisasi beban pajak.

Uppal (2005) mengatakan bahwa banyak praktik penghindaran pajak yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Ia menyatakan bahwa kasus penghindaran pajak dilakukan dengan tidak melaporkan atau melaporkan namun tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atas pendapatan yang dikenai pajak. Oleh sebab itu, *aggressive tax planning* menjadi penting untuk disorot mengingat pajak sangat penting sebagai faktor penentu pertumbuhan perusahaan jangka panjang, investasi, dan keberlanjutan perusahaan (Minnick dan Noga, 2010).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu unsur dari *aggressive tax planning*, seperti yang dikemukakan Frank *et al.* (2009) bahwa *aggressive tax planning* adalah suatu usaha merekayasa laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan cara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Contohnya di Indonesia adalah praktik penggelapan pajak terbesar yang dilakukan oleh PT.Asian Agri Tbk. pada awal tahun 2007. Kasus tersebut merupakan salah satu contoh nyata dari upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara ilegal. Upaya tersebut memang menguntungkan bagi jangka pendek karena beban pajak yang ditanggung menjadi berkurang, namun akan merugikan perusahaan di kemudian hari. Ada keuntungan dan kerugian dari aktivitas *aggressive tax planning* ini. Dari sisi *agency theory*, manfaat yang dapat diterima adalah penghematan pajak yang besar bagi perusahaan, namun *aggressive tax planning* ini dapat dikenai *marginal cost* yaitu potensi denda yang dilakukan oleh administrasi perpajakan, biaya pelaksanaan, biaya reputasi, dan biaya politik (Scholes *et al.* 2005; Slemrod 2004).

Pengukuran *aggressive tax planning* menggunakan tarif pajak efektif (ETR). Sebagaimana diutarakan oleh Karayan dan Swenson (2007), salah satu cara mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. Tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak (Richardson dan Lanis, 2007). Liansheng *et al.*, (2007) juga mengatakan bahwa ETR akan menjadi perhatian khusus karena dapat merangkum efek kumulatif berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *effective tax rate* salah satunya adalah keberagaman dewan komisaris yang bisa diukur dengan menggunakan diversitas dewan yaitu gender, komisaris independen dan ukuran dewan. *Centre for Tax Policy and Administration* (2004) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, diantaranya faktor individual seperti gender, umur dan tingkat pendidikan. Istilah *gender* dikaitkan dengan jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Schuetze (2002) dalam Hai dan See (2011) menunjukkan bahwa gender merupakan perilaku sosiologis yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Dalam studinya, Jackson dan Miliron (1986) menemukan bukti bahwa gender dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa wajib pajak wanita lebih patuh daripada wajib pajak pria. Sejalan dengan penelitian Kusumastuti dkk (2006) yang mengungkapkan bahwa wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dibandingkan pria. Sisi inilah yang membuat wanita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga dengan adanya wanita dikatakan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah.

Komisaris independen mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, hal ini dikarenakan pada peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pasal 21 ayat 2 dijelaskan bahwa komisaris independen harus dimiliki oleh perusahaan sebagai komisaris yang independen dan tidak memihak pada siapapun dalam perusahaan, sehingga semakin banyaknya komisaris independen, diharapkan dapat mendorong adanya transparansi.

Kusumastuti dkk. (2006) mengemukakan bahwa dewan perusahaan yang didominasi oleh pihak luar perusahaan akan menghasilkan tata kelola perusahaan yang lebih kuat karena mereka bersifat lebih independen dalam mengawasi perilaku manajemen. Lanis dan Richardson (2011) mengatakan bahwa proporsi dewan independen yang lebih tinggi memiliki peran penting untuk mengurangi kemungkinan agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian Maharani dan Suardana (2014), yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak.

Ukuran dewan juga merupakan variabel yang berpengaruh dalam manipulasi manajerial yang agresif (Dridi dan Adel, 2016). Boussaidi dan Mounira (2015) mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh dalam melakukan penentuan pengukuran perencanaan pajak. Beasley (1996) menemukan bahwa kemungkinan fraud akan meningkat seiring dengan ukuran dewan. Efektivitas dewan tergantung pada ukurannya (Jensen, 1993). Padahal, ukuran dewan bisa mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan. Ini mengacu pada jumlah komisaris yang ada dalam dewan. Dengan demikian, Lanis dan Richardson (2011), melaporkan bahwa ukuran dewan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perencanaan pajak agresif. Sebaliknya, Aliani dan Zarai (2012) tidak menemukan hubungan antara ukuran dewan dan agresivitas pajak dalam penelitiannya di Amerika, mereka menemukan jumlah dewan komisaris tidak mempengaruhi strategi untuk meminimalkan beban pajak. Minnick dan Noga (2010) menunjukkan bahwa dewan direksi kecil memperkuat manajemen pajak yang baik, sementara dewan besar terbukti tidak efektif karena kesulitan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan agresivitas pajak. Zemzem dan Ftouhi (2013) yang meneliti efek karakteristik dewan komisaris dan agresivitas pajak menemukan bahwa ukuran dewan yang kecil akan mengurangi agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Perusahaan yang berskala besar, harusnya memiliki sumberdaya yang lebih besar pula jika

dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil yang dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak dan lobi politik (Noor *et al.*, 2010). Berbeda pendapat dengan penelitian diatas, Derashid dan Zhang (2003) mengatakan bahwa perusahaan yang berskala besar akan membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan berskala kecil.

Profitabilitas juga dapat mempengaruhi *aggressive tax planning*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, tentu akan dikenai beban pajak yang tinggi pula. Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal (1) menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima subjek pajak akan dikenai pajak penghasilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya profitabilitas perusahaan akan meningkatkan beban pajak penghasilan yang dikenakan pada perusahaan. Didukung dengan penelitian Chiou *et al.*, (2012) yang menemukan bahwa profitabilitas berhubungan positif terhadap tarif pajak efektif. Namun, Noor *et al.*, (2010) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi, akan mengurangi beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lainnya sehingga tarif pajak yang dibayar akan lebih rendah daripada yang seharusnya. Sejalan dengan penelitian Derashid dan Zhang (2003) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas menghasilkan hasil pengujian yang berbeda-beda dalam meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap *aggressive tax planning*. Hasil penelitian yang berbeda-beda inilah yang membuat topik ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan adaptasi perusahaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap *aggressive tax planning* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada semua sektor non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015.

TELAAH TEORETIS

Frank *et al.* (2008) mendefinisikan *aggressive tax planning* sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. Tindakan *aggressive tax planning* ini tidak selalu berawal dari ketidakpatuhan akan aturan perpajakan, tapi juga dari penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan aturan. Namun semakin banyak celah yang dimanfaatkan perusahaan untuk menghemat beban pajak, maka perusahaan dianggap semakin agresif dalam perpajakannya meskipun tidak menyalahi aturan yang ada.

Ketika manajer memuuskan untuk melakukan *aggressive tax planning* mereka akan membuat perhitungan terlebih dahulu mengenai keuntungan dan kerugiannya. Ada beberapa kelebihan dan kerugian yang dapat dijabarkan sebagai berikut (Sari dan Martani, 2010) :

Keuntungan :

- Penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik atau pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
- Keuntungan (langsung maupun tidak langsung) bagi manajer untuk mendapatkan kompensasi dari pemilik dan pemegang saham atas tindakan *aggressive tax* mereka.
- Keuntungan bagi manajer untuk melakukan *rent extraction*

Kerugian :

- Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak sehingga menurunkan harga saham karena adanya tindakan *aggressive tax* yang dilakukan oleh manajer untuk melakukan *rent extraction*.
- Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak

Menurut Desai dan Dharmapala (2009) dalam Kamila dan Dwi Martani (2014) tindakan *aggressive tax planning* dapat diklasifikasikan menjadi dua pandangan yaitu tradisional dan kontemporer. Pandangan tradisional mengartikan *aggressive tax planning* sebagai bentuk pengamanan kekayaan dimana tindakan ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan pada pandangan kontemporer bahwa *aggressive tax planning* didefinisikan sebagai bentuk *rent extraction*. *Rent extraction* adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham melainkan untuk kepentingan pribadi. Dalam pandangan kontemporer *aggressive tax planning* mempunyai dua tujuan yaitu menutup-nutupi pendapatan dari otoritas pajak dan menutup-nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham.

METODE PENELITIAN

Sampel dan Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. Penentuan sampel menggunakan dalam tipe *nonprobability sampling* yaitu dengan metode *judgement sampling*. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan *Non Probability sampling* dengan kriteria : (1) Mempublikasikan laporan tahunan secara kontinyu dari tahun 2013 sampai dengan 2015. (2) Menyajikan laporan keuangan dengan mata uang dalam nilai rupiah. (3) Menyertakan daftar nama anggota komisaris dan keterangan komisaris independen pada catatan atas laporan keuangan. (4) Perusahaan yang tidak memiliki kompensasi rugi fiskal agar tidak menyebabkan distorsi dalam pengukuran penghindaran pajak (Richardson dan Lanis, 2007). Berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan maka diperoleh 209 perusahaan yang terpilih sebagai data sampel penelitian ini.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *effective tax rate* (ETR). *Effective tax rate* adalah tarif pajak efektif, yang diukur sebagai laporan antara

beban pajak penghasilan dan pendapatan sebelum pajak. Dyreng *et al.* (2010) dan Wilson (2009) menggunakan variabel ini dalam penelitiannya mengenai perencanaan pajak. Persamaan ETR adalah sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

Variabel independennya adalah karakteristik dewan komisaris yang dibagi menjadi :

- **Diversitas Gender (DIV)**

Jackson dan Milliron (1986) mengatakan bahwa merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi sikap kepatuhan pajak dan perilaku wajib pajak. Keragaman dalam dewan diukur dari persentase perempuan yang ada dalam dewan. Dalam penelitian ini, representasi keragaman diperoleh dari proksi laporan perusahaan. Variabel ini merupakan variabel *dummy* yaitu bernilai 1 jika ada 20% atau lebih wanita yang ada dalam dewan, dan 0 jika sebaliknya.

$$\text{Diversitas gender (DIV)} = \% \text{ Wanita dalam Dewan Komisaris}$$

- **Komisaris Independen (IND)**

Komisaris independen adalah anggota dewan yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan organisasi tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham. Beasley dan Petroni (2001) mengatakan seorang komisaris dikatakan independen ketika ia tidak memiliki hubungan kepentingan dengan perusahaan baik nya tim. Independensi dan keahlian direksi eksternal memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang objektif. Komisaris independen dapat melakukan fungsi monitoring dengan lebih baik, pengambilan keputusan dan juga fungsi perbaikan atas kesalahan maupun kecurangan dalam pelaporan keuangan.

$$\text{Komisaris Independen (IND)} = \% \text{ Komisaris Independen}$$

- **Ukuran Dewan (BSI)**

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah personel dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Adams dan Mehran (2003) yang menyatakan ukuran dewan komisaris yang besar dapat memonitor tindakan manajemen secara efektif dan menghasilkan praktik manajemen yang lebih baik. Richardson *et al.* (2011) menggunakan variabel ini dalam penelitiannya mengenai agresivitas pajak.

$$\text{Ukuran Dewan (BSI)} = \log \text{Total Dewan Komisaris}$$

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan.

- **Profitabilitas (ROA)**

ROA merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya. Laba yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja penjualan perusahaan mencapai targetnya. ROA diukur dengan pembagian antara pendapatan bersih dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

- **Ukuran Perusahaan (SIZ)**

Variabel ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan.

$$SIZ = \log \text{Total Aset}$$

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 4 model yaitu:

- **Model 1 :**

$$ETR_{it} = \alpha + \alpha_1 DIV_{it} + \alpha_2 IND_{it} + \alpha_3 BSI_{it} + ROA_{it} + SIZ_{it} + e_{it}$$

- **Model 2 :**

$$ETR_{it} = \alpha + \alpha_1 DIV_{it} + \alpha_2 IND_{it} + \alpha_3 BSI_{it} + SIZ_{it} + e_{it}$$

(sampel ROA kecil)

- **Model 3 :**

$$ETR_{it} = \alpha + \alpha_1 DIV_{it} + \alpha_2 IND_{it} + \alpha_3 BSI_{it} + SIZ_{it} + e_{it}$$

(sampel ROA besar)

- **Model 4 :**

$$ETR_{it} = \alpha + \alpha_1 DIV_{it} + \alpha_2 IND_{it} + \alpha_3 BSI_{it} + ROA_{it} + e_{it}$$

(sampel SIZ kecil)

- **Model 5 :**

$$ETR_{it} = \alpha + \alpha_1 DIV_{it} + \alpha_2 IND_{it} + \alpha_3 BSI_{it} + ROA_{it} + e_{it}$$

(sampel SIZ besar)

Dimana :

ETR_{it} = *effective tax rate*

α = konstanta persamaan regresi

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = koefisien tiap variabel

DIV_{it} = diversitas gender; merupakan variabel *dummy* 1 jika komisaris wanita lebih dari 20%, 0 jika sebaliknya

IND_{it} = komisaris independen

BSI_{it} = ukuran dewan komisaris

ROA_{it} = profitabilitas perusahaan

SIZ_{it} = ukuran perusahaan

ϵ_{it} = *error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang diteliti dari nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Gambar statistik dari masing-masing variabel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	ETR	DIV	IND	BSI	ROA	SIZ
<i>Mean</i>	0.257674	0.344498	0.123336	0.660483	0.362795	12.36880
<i>Median</i>	0.247659	0.000000	0.111111	0.698970	0.063317	12.38904
<i>Maximum</i>	5.796300	1.000000	0.666667	1.146128	128.7272	14.38994
<i>Minimum</i>	(3.186069)	0.000000	0.000000	0.301030	(0.097143)	9.433196
<i>Srd. Dev.</i>	0.405394	0.475584	0.139065	0.171755	5.468828	0.716359
<i>Skewness</i>	5.716571	0.654466	0.789421	0.030401	21.67644	(0.144615)
<i>Kurtosis</i>	98.32045	1.428325	2.818297	2.643356	494.2355	3.272885
<i>Jarque-Bera</i>	240786.4	109.2930	65.98547	3.419559	6353386	4.130899
<i>Probability</i>	0.000000	0.000000	0.000000	0.180906	0.000000	0.126761
<i>Sum</i>	161.5614	261.0000	77.33157	414.1229	277.4725	7755.240
<i>Sum Sq.Dev.</i>	102.8797	141.5885	12.10634	18.46691	18722.46	321.2441
<i>Observations</i>	627	627	627	627	627	627

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai minimum pada variabel ETR sebesar (3.186069) yang terdapat pada perusahaan JAWA yaitu Jaya Agra Wattie Tbk. dan nilai maksimum sebesar 5.796300 yang terdapat pada perusahaan KICI yaitu Kedaung Indah Can Tbk. dengan nilai rata-rata 0.257674 dan standar deviasi 0.405394. Dari hasil yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa sebaran data termasuk dalam golongan baik, karena standar deviasinya dibawah 5. Dapat dilihat mediannya adalah 0.247659, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan dapat dikatakan agresif dalam pajaknya apabila ETR menunjukkan angka lebih besar dari 0.247659.

Nilai minimum pada variabel BSI yang diproksi dari logaritma total dewan komisaris sebesar 0.31030 yang terdapat pada perusahaan AIMS yaitu Akbar Indomakmur Stimec Tbk. dan nilai maksimum sebesar 1.146128 pada perusahaan TCID yaitu Mandom Indonesia Tbk. dan standar deviasi sebesar 0.171755. Dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel ini tergolong baik karena standar deviasinya kurang dari 5.

Nilai minimum pada variabel ROA yang dinilai dari perputaran aset perusahaan sebesar (0.097143) terdapat pada perusahaan KICI yaitu Kedaung Indah Can Tbk. dan nilai maksimum pada variabel ROA sebesar 128.7272 pada perusahaan BSDE yaitu Bumi Serpong Damai Tbk. dengan standar deviasi 5.468828, maka disimpulkan sebaran data variabel ROA tidak baik karena standar deviasinya diatas 5.

Nilai minimum pada variabel SIZ yang dinilai dari ukuran perusahaan sebesar 9.433196 terdapat pada perusahaan SMBR yaitu PT Semen Baturaja Tbk. dan nilai maksimum pada variabel SIZ sebesar 14.38994 pada perusahaan ASII yaitu Astra International Tbk. dengan standar deviasi 0.716359, yang dapat disimpulkan bahwa sebaran data variabel SIZ baik karena standar deviasinya dibawah 5.

Tabel 2
Uji Koefisien Determinasi

Model Pengujian	Adjusted R-squared
Model 1 (semua data)	0.001546
Model 2 (ROA kecil)	-0.006482
Model 3 (ROA besar)	0.001758
Model 4 (SIZ kecil)	0.033780
Model 5 (SIZ besar)	-0.010228

Pada hasil pengujian dapat kita lihat bahwa model 1,2,3,dan 5 tidak mempunyai nilai adjusted R-squared yang lebih dari 0 persen. Namun pada model 4 Jika dilihat dari uji R^2 pada model 4, nilai adjusted R-squared yang diperoleh sebesar 3.37%, maka dapat disimpulkan bahwa hanya pada model 4, variabel dependen yaitu ETR dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti yaitu DIV, IND, BSI, ROA, dan SIZ.

Tabel 3
Hasil Uji Simultan F

Model Pengujian	Prob (F-statistic)	One Tail
Model 1	0.310587	0.1552935
Model 2	0.732774	0.36638
Model 3	0.337836	0.168918
Model 4	0.005854	0.002927
Model 5	0.928368	0.464184

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis satu arah (*one tailed*) sehingga hasil *probability* F-statistic harus dibagi 2 terlebih dahulu. Pada model 1,2,3,dan 5 tidak ada nilai probabilitas yang kurang dari 5%. Namun, pada model 4, dapat dilihat nilai prob F-statistic yang diperoleh sebesar 0.002927 atau lebih besar dari 5%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa variable independen yang ada pada model 4 yaitu DIV, IND, BSI, ROA, dan SIZ secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel ETR.

Tabel 4
Uji Parsial (Uji t)

Model Pengujian	Variabel	Coefficient	Probability	One Tail
Model 1	DIV	0.003062	0.9317	0.46585
	IND	-0.138310	0.2786	0.1393
	BSI	-0.133405	0.3159	0.15795
	ROA	-0.001201	0.6955	0.34775
	SIZ	-0.032294	0.2980	0.1442
Model 2	DIV	0.014141	0.8392	0.4196
	IND	-0.189952	0.4207	0.21035
	BSI	-0.139529	0.5777	0.28885
	SIZ	-0.022941	0.6953	0.34765
Model 3	DIV	-.002460	0.9267	0.46335
	IND	0.060261	0.5554	0.2777
	BSI	0.037322	0.6899	0.34495

	SIZ	-0.400127	0.0645	0.03225**
Model 4	DIV	0.016777	0.7564	0.3782
	IND	-0.087713	0.5916	0.2958
	BSI	-0.184139	0.2881	0.14405
	ROA	-1.106866	0.0006	0.0003*
Model 5	DIV	-0.016573	0.7302	0.3651
	IND	-0.085850	0.5378	0.2689
	BSI	0.084262	0.6130	0.3065
	ROA	-0.000760	0.7993	0.39965

*** = signifikan pada level 0.01

** = signifikan pada level 0.05

* = signifikan pada level 0.1

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa hipotesis 1,2, dan 3 ditolak. Hal ini terjadi karena *probability* dalam hipotesis tersebut melebihi 5%. Hasil uji t pada model 2 dan 3, pada saat variabel ROA dipisah dan tidak dimasukkan dalam regresi hasilnya tidak signifikan terhadap variabel dependen penelitian karena semua variabelnya bernilai lebih dari 5%. Namun pada saat variabel SIZ dan ROA dipisah, ada dua model yaitu model 3 dan model 4 yang menunjukkan bahwa variabel ROA dan SIZ memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yakni ETR.

Pada uji parsial t, hasil yang signifikan pada ROA besar, terdapat pada variabel SIZ dengan nilai signifikan negatif sebesar 0.03225, yang dapat diartikan bahwa semakin besar perusahaan akan meningkatkan tingkat agresivitas pajak perusahaan, dan sebaliknya. Richardson dan Lanis (2007) mengemukakan adanya *political power theory* menjelaskan hubungan antara perusahaan besar dengan besarnya sumberdaya yang tersedia untuk melakukan manipulasi proses politik yang menguntungkan mereka dengan melakukan penghematan pajak yang optimal. Hsieh (2011) juga mendukung bahwa perusahaan yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih sedikit karena mereka mencurahkan banyak upaya untuk melakukan perencanaan pajak dan lobi politik. Porcano (1986) juga menemukan hubungan negatif antara ukuran perusahaan dengan tarif pajak efektif. Sejalan dengan penelitian Tran (1998) yang menemukan bahwa perusahaan yang besar mendapat manfaat yang lebih dari insentif, dividen, dan

perbedaan tarif pajak luar negeri daripada perusahaan kecil. Rego (2003) juga mengatakan bahwa pada umumnya perusahaan besar terlibat dalam banyak kegiatan bisnis dan lebih banyak transaksi keuangan sehingga memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak misalnya melalui transaksi antar perusahaan, pajak keuntungan sewa guna usaha, dan rencana pembiayaan.

Begitu pula pada saat SIZ kecil, terdapat pengaruh yang signifikan negatif pada variabel ROA sebesar 0,0003, yang dapat diartikan bahwa semakin besar profitabilitas perusahaan akan meningkatkan agresivitas pajak, dan sebaliknya. Atarwaman (2011) menjelaskan bahwa profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengukur efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola asset yang dimiliki. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik pula performa perusahaan dalam mengelola aset mereka untuk memperoleh *net income*. Tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh negatif dengan tarif pajak efektif karena semakin efisien perusahaan, maka perusahaan juga akan lebih efektif dalam mengelola pajak untuk mendapatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak lainnya sehingga akan menurunkan tarif pajak efektifnya (Noor *et al.*, 2010). Selain itu, pada perusahaan yang besar, maka transaksi yang dilakukan juga akan semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada dalam laporan keuangannya. Derashid dan Zhang (2003) juga menemukan hal yang sama bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung mengurangi tarif pajak efektif.

Namun pada kelima model, tidak ditemukan hasil yang signifikan pada karakteristik dewan komisaris yang terbagi atas komisaris independen, dan ukuran dewan. Dengan demikian dapat disimpulkan jika , komisaris independen, dan ukuran dewan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tarif pajak efektif sebagai pengukuran *aggressive tax planning*. Sehingga hipotesis 1,2, dan 3 ditolak. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* karena tingkat signifikansi yang diatas 5%, baik pada model 1,2,3,4, maupun 5. Hal ini dapat

diartikan bahwa H1 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keragaman tidak berpengaruh terhadap tindakan *aggressive tax planning* yang dilakukan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena posisi eksekutif di Indonesia masih banyak didominasi oleh pria, dapat terlihat juga pada rata-rata keragaman yang hanya sebesar 34%. Hal ini dikarenakan masih adanya fenomena *glass ceiling* yang terjadi di Indonesia, pria cenderung mendominasi pekerjaan-pekerjaan di tingkat *top management* sedangkan wanita dijadikan sebagai kaum minoritas. Kastlunger *et al.*, (2010) menyatakan bahwa perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh jenis kelamin terhadap kepatuhan perpajakan disebabkan oleh *gender role orientation*, karakteristik yang terasosiasi terhadap jenis kelamin yaitu lingkungan sosial dan pendidikan pada suatu negara. Emansipasi wanita yang mendorong terbukanya akses wanita kepada pendidikan dan perubahan *gender role orientation* pada suatu negara yang pada akhirnya menyebabkan adanya persamaan dalam sikap dan pengambilan keputusan antara wanita dan pria. Sejalan dengan hasil yang ditemukan Khaoula dan Zarei (2012) yang tidak menemukan hubungan signifikan antara keragaman dan *tax planning* pada perusahaan di Amerika.

Lalu dari hasil pengujian hipotesis 2, diperoleh bahwa komisaris independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* karena tingkat signifikansi yang diatas 5%, baik pada model 1,2,3,4, maupun 5. Hal ini dapat diartikan bahwa H2 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen tidak bisa menjadi tolak ukur tindakan *aggressive tax planning* yang dilakukan perusahaan. Kusumastuti (2007) menjelaskan hal menarik yang berkaitan dengan independensi, bahwa terdapat fenomena di Indonesia yang memberikan jabatan komisaris kepada seseorang bukan berdasarkan kompetensi dan profesionalisme namun sebagai penghormatan atau penghargaan. Sehingga dapat dikatakan pemilihan komisaris di Indonesia kurang mempertimbangkan integritas dan kompetensi. Selain itu dapat juga dikarenakan fungsi dewan komisaris yang tidak efektif, banyak komisaris yang melalaikan tugasnya untuk memberikan pengawasan (hukumonline.com). OJK pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa dewan komisaris pada perusahaan *go-public* harus memiliki

minimal 1 dewan komisaris independen. Pada pasal 20 ayat 3 juga dijelaskan bahwa dalam jumlah dewan komisaris yang lebih dari 2 orang komisaris, jumlah komisaris independen adalah paling kurang 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Namun nyatanya masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi peraturan tersebut atau bahkan sama sekali tidak memiliki komisaris independen. Selain itu, fungsi dewan komisaris itu sendiri yang hanyalah sebagai dewan pengawas dan pemberi nasihat saja dan tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan putusan operasional perusahaan termasuk dalam keputusan pajak. Sehingga adanya komisaris independen tidak memberi dampak pada peningkatan pengawasan terhadap manajemen sehingga tidak mempengaruhi tindakan *aggressive tax planning*. Temuan ini sependapat dengan penelitian Zhou (2011) dan Aliani (2012) yang tidak menemukan hubungan yang signifikan antara komisaris independen dan *aggressive tax planning*.

Pada pengujian hipotesis 3, ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *effective tax rate* karena tingkat signifikansi yang diatas 5%, baik pada model 1,2,3,4, maupun 5. Hal ini dapat diartikan bahwa H3 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan *aggressive tax planning* yang dilakukan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ujijanto dan Pramuka (2007) yang mengemukakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh dalam manajemen laba, dikarenakan ukuran dewan komisaris bukanlah faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan manajemen perusahaan. Akan tetapi tergantung pada nilai, norma, dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi serta peran dewan komisaris dalam aktivitas pengendalian terhadap manajemen. Selain itu alasan yang memungkinkan adalah melihat dari fungsi dewan komisaris itu sendiri yang hanyalah sebagai pengawas dan penasihat saja namun tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan operasional termasuk keputusan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *gender* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *aggressive tax planning*. Atau bisa diartikan apabila *gender* tidak dapat mempengaruhi *aggressive tax planning* yang dilakukan perusahaan. Begitu pula dengan karakteristik lainnya yaitu komisaris independen dan ukuran dewan komisaris.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan yaitu keterbatasannya ruang lingkup perusahaan yang dijadikan sampel hanyalah perusahaan *non* keuangan di Indonesia, pengukuran *aggressive tax planning* yang diproksi menggunakan ETR juga belum dapat mendeteksi adanya *aggressive tax planning* secara baik.

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengganti proksi pengukuran *aggressive tax planning* seperti *Cash ETR* dan *BTD (Book Tax Difference)*. Serta menggunakan pengukuran lain sebagai proksi tata kelola perusahaan seperti dewan direksi dan komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abor, J. 2007. Corporate Governance and Financing Decisions of Ghanaian Listed Firms. *Corporate Governance*, Vol. 7(1): 83-92.
- Al- Najjar, B., & Hussainey, K. 2011. Revisiting the Capital Structure Puzzle: UK Evidence. *The Journal of Risk Finance*, Vol.12(4), 329-338.
- Khaoula, A., and Zarai, M.A. 2012. Demographic Diversity in the Board and Corporate Tax Planning. *Journal Business Management and Strategy*, Vol.3(1), 72-86.
- Baldry, J.C. 1987. Income Tax Evasion and the Tax Schedule: Some Experimental Results. *Public Finance*, Vol. 42 (2): 357-383.
- Beasley, M. S., & Petroni, K. R. 2001. Board Independence and Audit-Firm Type. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, Vol 20: 97-114.

- Betz, M., Lenahan, O. and Shephard, J.M. 1989. Gender Differences in Proclivity for Unethical Behavior. *Journal of Business Ethics*, Vol. 8 (5): 321-324.
- Bhasin, K. 2003. Memahami Gender. Jakarta. Teplok Press.
- Booth, Alison L. and Patrick J. Nollen . 2009 . Gender Differences in Risk Behaviour: Does Nurture Matter? Australian National University University of Essex and IZA. Discussion Paper No.4027.
- Boussaidi, A., and Mounira, S.H. 2015. The Impact of Governance Mechanism on Tax Aggressiveness: Empirical Evidence from Tunisian Context. *Asian Economic and Social Society*, Vol.5(1), 1-12.
- Burr, V. 2002. "Gender and Social Psychology". London: Routledge.
- Centre for Tax Policy and Administration. 2004. Compliance Risk Management : Managing Improving Tax Compliance Organization for Economic Cooperation and Development
- Cerbioni, F. and Antonio, P. 2007. Exploring the Effects of Corporate Governance on Intellectual Capital Disclosure: An Analysis of European Biotechnology Companies. *European Accounting Review*, Vol 16(4): 791-826.
- Chen, S., Xia, Chen., Qiang Cheng., and Terry Shevlin. 2008. Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-Family Firms?
- Chiao, Y.C., Hsieh, Y.C., and Lin, W. 2012. Determinants of Effective Tax Rates for Firm Listed on China's Stock Markets: Panel Models with Two-Sided Censors. *Business and Management Review*, Vol.3(1).
- Croson, R. & Gneezy, U. 2009. "Gender Differences in Preferences". *Journal of Economic Literature*, Vol.47(2): 448-474.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak efektif. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Desai, M.A. and Dhammika, D. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*. Vol.79: 145-179.

- Dridi,W., and Adel,B. 2016. Corporate Governance and Book-Tax Differences: Tunisian Evidence. *International Journal of Economics and Finance*, Vol.8(1), 171-186.
- Dyrenng, S., Hanlon, M. and Maydew, E. 2008. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol.85(4): 1163-1189.
- Egon Zehnder International. 2000. *Corporate Governance and the Role of The Board of Directors*. London : Egon Zehnder International Press.
- Fallan, L. 1999. Gender, Exposure to Tax Knowledge, and Attitudes towards Taxation: An Experimental Approach. *Journal of Business Ethics*, Vol. 18 (2): 173-184.
- Friedland, N., Maital, S., & Rutenberg, A.1978. A Simulation Study of Income Tax Evasion. *Journal of Public Economics*, Vol.10: 107–116.
- Ghozali,Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS. Edisi 3.
- Gonzalez,J.S. and Garcia, M.E. 2013. Does Corporate Governance Influence Earnings Management in Latin American Markets. *Journal of Business Ethics*. Vol.121(3): 419-440.
- Hsieh,Y.C. 2011. Tax Policy, Firm Size and Effective Tax Rates: Empirical Evidence from Quantile Regression. *International Journal of Economics*. Vol.5(2): 227-234.
- Jackson, B. R. and Valerie C. Milliron. 1986. Tax Compliance Research : Findings, Problems, and Prospects. *Journal of Accounting Literature*, Vol. 5: 125-165.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*, Vol. 3(4): 305-360.
- Judisseno, Rimsky K. 1997. Perpajakan (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Kamila, P.A. dan Dwi Martani. 2013. Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVII*.
- Karayan, John E and Charles W. Swenson. 2007. "Strategic Business Tax Planning". New Jersey: John Wiley and Sons.
- Kaspillai, J. and Hijattulah, A.J. 2006. Gender and Ethnicity Differences in Tax Compliance. *Asian Academy of Management Journal*. Vol.11(2): 73-88.
- Kastlunger, B., Dressler, S., Kirchler, E., Mittone, L. & Voracek, M. (2010) Sex Differences in Tax Compliance: Differentiating between Demographic Sex, Gender-Role Orientation, and Prenatal Masculinization (2D:4D). *Journal of Economic Psychology*, Vol.31: 542-552.
- Kawor, S., and Holy, K.K. 2014. Effect of Tax Planning on Firms Market Performance: Evidence from Listed Firms in Ghana. *International Journal of Economics and Finance*, Vol.6(3).
- Khaoula, A., Ali, M. 2012. Demographic Diversity in the Board and Corporate Tax Planning in American Firms. *Business Management and Strategy*, Vol.3(1): 72-86.
- Kirchler, E., & Maciejovsky, B. 2001. Tax Compliance within the Context of Gain and Loss Situations, Expected and Current Asset Position, and Profession. *Journal of Economic Psychology*, Vol.22: 173-194.
- Kusumastuti, S., Supatmi, dan Perdana, S. 2007. Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.9(2): 88-98.
- Liansheng W, Y, W. 2007. State Ownership, Tax Status and Size Effects of Effective Tax Rate in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol.26(6).
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Mangoting, Yenny. 1999. *Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1(1): 43 – 53.

- Minnick, K., and Noga, T. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance*, Vol.16: 703-718.
- Mosse, J.C. 1996. "Gender dan Pembangunan". Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Noor, R.M., Nor'Azam, M., and Barjoyai, B. 2008. Corporate Effective Tax Rates :A Study on Malaysian Public Listed Companies. *Malaysian Accounting Review*. Vol.7(1)
- Orviska, M. & Hudson, J., 2003. Tax Evasion, Civic Duty and the Law Abiding Citizen. *European Journal of Political Economy*, Vol.19(1): 83-102.
- Rego, S.O. 2003. Tax-Avoidance Activities of US Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 20(4): 805-833.
- Reiner, M.D. and John P. Gearhart, M.D. 2004. Discordant Sexual Identity in Some Genetic Males with Cloacal Exstrophy Assigned to Female Sex at Birth. *New England Journal of Medicine*, Vol.350(4).
- Richardson, G and Roman, L. 2011. The Effect of Board of Directors Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol.30: 50-70.
- Richardson, G., R. and Lanis. 2007. Determinants of Variability in Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform : Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, :pp:689-704.
- Rodriguez, E., F. and Arias, A., M. 2012. "Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?". *The Chinese Economy*, Vol. 45 No. 6
- Shleifer, A. and R.W. Vishny. 1997. A Survey of Corporate Governance. *Journal of Finance*, Vol 52(2): 737-783
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak (Edisi Lima)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujono dan Soebiantoro, U. 2007. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, Leverage, Faktor Intern dan Faktor Ekstern terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 9(1): 41-48.

- Suyanto, K.D. dan Supramono. 2012. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol.16(2): 167-177.
- Tran, A.V. 1998. Causes of the book-tax income gap. *Australian Tax Forum*. Vol.14(3): 253–286.
- Ujiyantho,U. dan Bambang,A.P. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi 10.
- Uppal J.S. 2005. Kasus Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Economic Review Journal*, 201.
- Walby,Karen. 2010. What Is the Difference between Tax Rates? American for Taxation.
- Waluyo, Basri, dan Rusli. 2015. Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan
- Waworuntu,S.R, Wantah, M.D. 2014. CSR and Financial Performance Analysis: Evidence from Top ASEAN Listed Companies. *Social and Behavioral Sciences*, Vol.164: 493-500.
- Weiten, N.H. 2010. “Psychology Themes and Variations”. Las Vegas: Wadsworth Cengage Learning.
- WHO (World Health Organization). 2012. “What do We Mean by Sex and Gender?”
- Yermack, D. 2004. Remuneration, Retention, and Reputation Incentives for Outside Directors. *Journal of Finance*, Vol.59: 2281-2308.
- Zain, Mohammad. 2005. Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta.
- Zemzem,A. and Ftouhi, K. 2013. The Effect of Board of Directors’ Characteristics on Tax Aggressiveness. *Journal of Finance and Accounting*, Vol.4(4): 140-147.

Zhu, Y.S. and Cai, L.Q. 2006. Effects of Male Sex Hormones on Gender Identity, Sexual Behaviour, and Cognitive Function. *Journal of Central South University, Medical Sciences*, Vol.31(2) : 149-161.

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/03/160308_dunia_pekerja_perempuan
(diakses pada 12 Mei 2017).

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3564/fungsi-komisaris-independen-belum-efektif> (diakses pada 24 April 2017).

<http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html> (diakses pada 18 April 2017).

